

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SEBAGAI STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERDESAAN

Akhmadi¹, Hermanto Siregar^{**}, dan M Parulian Hutagaol^{**}

^{*)} Lembaga Peneliti SMERU

Jl. Cikini Raya No. 10A, Jakarta 10310

^{**}) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
Jl. Kamper Wing 2 Level 5, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680

ABSTRACT

Agribusiness and Rural Entrepreneurship Development Program (PUAP) is one of the poverty reduction programs in rural areas under the coordination of the National Program for Community Empowerment. PUAP program provides capital assistances for farmer group members i.e. land owning farmers, tenant farmers, farm laborers, and farm households coordinated by the Joint Farmers Group. The objective of this study was to formulate the best strategy to overcome poverty in rural areas. The analytical methods utilized in this were Double Difference and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) analyses. The results showed that PUAP program has a significant impact on an increase in rice production per hectare and in income of farmers in Jati village respectively reaching up to 641.14 kg and Rp 878.358 larger than those in Jamali village in which PUAP program was not applied. Thus, QSPM analysis was carried out by an elaboration of eight key strategies with internal and external strategic factors to achieve the best strategy. The calculation result of Total Attractiveness Scores (TAS) showed that the strategy to strengthen human resources and institutional farmers through a special education program for agribusiness management development for farmers is perceived to be the most efficient strategy.

Keywords: poverty, rural, PUAP, TAS, QSPM

ABSTRAK

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan salah satu program pengurangan kemiskinan di perdesaan di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri sebagai program pemberdayaan masyarakat. Program PUAP memberikan bantuan modal usaha bagi petani anggota kelompok tani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumahtangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani. Tujuan penelitian ini adalah untuk memformulasikan strategi terbaik penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis Double Difference dan analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Hasilnya menunjukkan bahwa program PUAP telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi padi per hektar dan pendapatan petani di Desa Jati masing-masing sebesar 641,14 kg dan Rp878.358 lebih besar dibandingkan dengan produksi padi dan pendapatan petani di Desa Jamali yang tidak menerima Program PUAP. Hasil analisis QSPM, yaitu dengan mengelaborasi delapan strategi kunci tersebut dengan faktor-faktor strategis internal dan eksternal untuk mendapatkan strategi yang terbaik. Hasil perhitungan Total Attractiveness Scores (TAS) menunjukkan bahwa strategi penguatan sumberdaya manusia dan kelembagaan petani melalui program pendidikan khusus pengembangan manajemen agribisnis bagi petani adalah strategi yang terbaik.

Kata kunci: kemiskinan, perdesaan, PUAP, TAS, QSPM

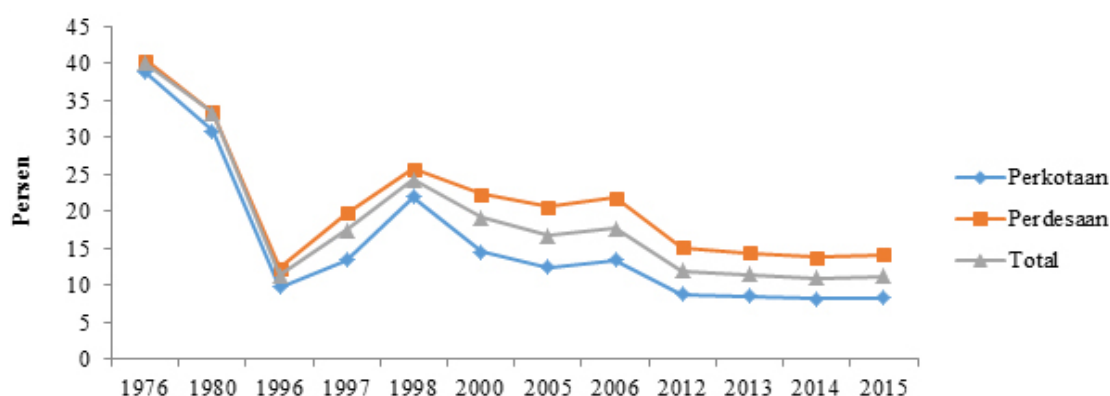
¹ Alamat Korespondensi:
Email: akhmadi@smeru.or.id

PENDAHULUAN

Pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan penduduk agar tercapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Secara nasional, tingkat kemiskinan turun dari 15,42% (2008) menjadi 10,96% (2014). Namun, jika dilihat wilayahnya, tingkat kemiskinan di perdesaan selalu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun dari 11,65% (2008) menjadi 8,16% (2014), sedangkan di perdesaan turun dari 18,93% (2008) menjadi 13,76% (2014). Dari total rakyat miskin di Indonesia, sekitar 66% berada di perdesaan dan sekitar 56% menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian program-program penanggulangan kemiskinan khususnya di perdesaan dan merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan sehingga didapatkan strategi terbaik berdasarkan kondisi internal dan eksternal yang dihadapi petani. Di beberapa negara pengurangan kemiskinan dilakukan melalui pengurangan kemiskinan di perdesaan. Francis dan David (2012) menemukan cara terbaik untuk memberdayakan penduduk perdesaan adalah dengan memberdayakan mereka melalui pekerjaannya. Pertanian merupakan pekerjaan penduduk desa dan pengembangan produksi pertanian dilakukan dengan peningkatan produktivitas antara lain dengan memberikan insentif bagi penyuluh agar mereka melakukan pekerjaannya secara efektif.

Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan bukannya tanpa masalah. Sebagai konsekuensi perekonomian yang bersifat terbuka, Indonesia tidak terlepas dari pengaruh ekonomi global. Krisis moneter yang berlanjut dengan krisis ekonomi yang melanda Asia pada 1997/1998 berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Krisis ini telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat tajam, baik secara absolut maupun persentase. Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin sebanyak 34,5 juta jiwa atau 17,65% meningkat menjadi 47,7 juta jiwa atau 23,43% pada 1999, serta berangsur-angsur turun menjadi 17,75% pada 2006, 15,42% pada 2008, dan bahkan tinggal 10,96% pada 2014. Namun, pada 2015 tingkat kemiskinan meningkat kembali menjadi 11,22% (Gambar 1).

Dengan adanya penurunan tingkat kemiskinan yang dilihat wilayah perkotaan dan perdesaan maka tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan masih cukup tinggi. Sebaliknya, pada saat sebelum krisis ekonomi 1998 tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan hampir berimbang. Tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di perdesaan ini menjadi masalah dalam pengurangan kemiskinan secara nasional. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan di perdesaan secara lebih cepat menjadi prioritas bagi pemerintah untuk segera diselesaikan.



Gambar 1. Tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan, beberapa tahun terpilih

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengkategorikan Program Penanggulangan Kemiskinan ke dalam Kluster I, Kluster II, Kluster III, dan Kluster IV. Kluster I mencakup kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang mencakup Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk keluarga miskin (Raskin), dan bantuan siswa miskin (BSM). Kluster II mencakup kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan jenis program yang disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kluster III kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi kepada usaha mikro dan kecil diberikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya, pada Kluster IV berupa Program Pro Rakyat yang menyediakan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin dengan harga murah koordinasi pelaksanaan kegiatan sektoral pada wilayah tertentu. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang termasuk ke dalam Kluster II.

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan di perdesaan di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok pemberdayaan masyarakat. Program PUAP memberikan bantuan modal usaha bagi petani anggota kelompok tani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumahtangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Untuk mengkaji dampak program penanggulangan kemiskinan di perdesaan terhadap pendapatan petani dilakukan studi kasus pelaksanaan Program PUAP di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Sejak Program PUAP digulirkan pada 2008, telah dilakukan berbagai kajian tentang pelaksanaan Program PUAP. Anggriani (2012) menemukan bahwa dampak pelaksanaan Program PUAP mengakibatkan peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga petani penerima PUAP sebesar 12,86%. Namun, saat dilakukan uji beda rata-rata terhadap pendapatan setelah Program PUAP antara kelompok anggota PUAP dan kelompok non anggota PUAP dihasilkan tidak berbeda nyata. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian untuk mengevaluasi dampak Program PUAP

dengan membandingkan antara kelompok penerima bantuan program PUAP (*a treatment group*) dengan kelompok pembanding (*a comparison group*) sebelum dan setelah program PUAP sehingga dapat diketahui seberapa besar dampak program PUAP.

Dari aspek kelembagaan, Kamira *et al.* (2011) menemukan bahwa pelaksanaan program PUAP di Kota Padang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dari sebanyak lima fokus kajian dengan 11 subkajian, sebanyak tiga subkajian dilaksanakan lebih dari 75% sesuai ketentuan, sedangkan delapan lainnya kurang dari 75%. Selain itu, pelaksanaan penyaluran dana bergulir oleh Gapoktan ditemukan ada penyimpangan. Terjadinya penyimpangan disebabkan kurang seriusnya pengurus dalam memahami maksud dan tujuan program PUAP. Ariyanti (2011) menemukan bahwa fungsi Gapoktan belum efektif dan belum berfungsi dengan baik. Lastinawati (2011) berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa disarankan perlu usaha pembinaan yang kontinyu untuk terus meningkatkan kualitas petani maupun penguatan kelembagaan petani (Gapoktan), perlu dilakukan monitoring, dan evaluasi dari tim teknis PUAP secara kontinyu, perlunya perhatian khusus terhadap kesejahteraan penyuluh pendamping, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor lain yang memengaruhi program PUAP. Oleh karena itu, Saptana *et al.* (2013) menyarankan pembentukan gapoktan sebaiknya ditekankan untuk memperkokoh ikatan horisontal seperti penanganan pascapanen, pengolahan hasil, pemasaran, dan membangun kemitraan usaha agribisnis. Sementara Wibowo dan Hayati (2013) menganalisis bahwa pemberdayaan organisasi pada kuadran I dari analisis SWOT yang menandakan kelembagaan kuat dan memiliki peluang besar. Strategi yang digunakan adalah mengembangkan kelembagaan tani dengan teknologi terbarukan yang efisien, membentuk unit usaha pemasaran Gapoktan, dan menumbuhkan unit lembaga keuangan mikro.

Penelitian tentang pelaksanaan program PUAP juga dilihat dari partisipasi petani. Lastinawati (2011) berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi petani dalam pelaksanaan PUAP di Kabupaten OKU, termasuk dalam klasifikasi sedang (48,3%). Selain itu terdapat perbedaan tingkat partisipasi petani dalam program PUAP di Kabupaten OKU berdasarkan status sosial petani, dan kegiatan pendampingan yang pernah diikuti petani. Di sisi lain, tingkat partisipasi petani tidak berbeda berdasarkan

pendidikan petani, pelatihan yang pernah diikuti, dan sosialisasi program.

Dilihat dari aspek pendapatan petani, Suryadi, Remi, dan Mulyarijadi (tanpa tahun) melalui penelitiannya di Purwakarta menemukan bahwa pemberian bantuan tambahan modal usaha tani melalui program PUAP memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha tani, namun pengaruh dari pelaksanaan program PUAP tersebut masih sangat kecil untuk meningkatkan pendapatan usaha tani. Burhansyah (2010) menemukan bahwa kinerja penyaluran dana bantuan langsung masyarakat Gapoktan PUAP belum optimal. Faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut antara lain adalah faktor geografis di Kalimantan Barat tempat penelitian ini dilakukan dan faktor pendampingan yang belum optimal. Sisilia *et al.* (2012) menyimpulkan bahwa rata-rata pendapatan usaha tani padi penerima program PUAP lebih tinggi daripada pendapatan petani non penerima program PUAP, yaitu Rp16.754.637/tahun/ha dibanding Rp13.037.452/tahun/ha. Penelitian Kirchweger *et al.* (2015) di Austria menunjukkan bahwa usaha tani yang berpartisipasi dalam program pemerintah memiliki peningkatan produksi yang signifikan dibanding usaha tani yang tidak berpartisipasi dalam program. Bantuan modal dan kredit semacam PUAP juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani sebagaimana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian de Rosari *et al.* (2014).

Berbagai penelitian telah dilakukan berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi produksi padi maupun pendapatan dari usaha tani, dan berbagai penelitian tentang pelaksanaan Program PUAP di berbagai wilayah. Kohls dan Uhl (2002) menyatakan bahwa pendapatan bersih dari pertanian dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu volume produk pertanian yang terjual, harga produk pertanian, dan biaya produksi dan pemasaran dari produk pertanian tersebut. Penelitian Prabandari *et al.* (2013) menyimpulkan bahwa peubah bebas luas lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk, obat-obatan, dan air secara bersama-sama berpengaruh sangat nyata terhadap peubah tak bebas produksi padi sawah. Demikian juga Hasyim *et al.* (2013) menyimpulkan bahwa faktor-faktor bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh nyata terhadap produksi padi sawah.

Dari berbagai hasil penelitian tersebut, studi ini ingin menjawab apakah Program PUAP memiliki dampak nyata terhadap produksi padi dan peningkatan pendapatan di Kabupaten Cianjur, khususnya di desa penelitian. Selain itu, apakah peningkatan pendapatan petani dapat melampaui garis kemiskinan pada tahun yang sama? Dari studi kasus ini, apakah perlu strategi yang lebih khusus dirumuskan agar dapat mengurangi kemiskinan di perdesaan lebih cepat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di dua desa di dua kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*. Pemilihan desa penerima PUAP diupayakan desa yang Gapoktannya sudah memiliki Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A). Desa yang tidak menerima Program PUAP diupayakan desa yang memiliki kondisi geografis, sosial, dan ekonomi, serta sistem irigasi dan keberadaan penyuluh pertanian yang hampir sama dengan desa penerima PUAP. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2015 dengan mewawancarai pejabat dan pelaksana Program PUAP serta perumus kebijakan di Kementan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur, Penyuluh Pertanian, Penyelia Mitra Tani, aparat desa, dan responden petani pemilik lahan pertanian padi. Selain itu juga dikumpulkan data sekunder dari instansi terkait.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data berkala (*time series*), data kuantitatif dan data kualitatif yang berasal dari data sekunder dan data primer. Data sekunder mencakup data desa dan Gapoktan penerima Program PUAP, serta data petani. Data primer dikumpulkan dengan mewawancarai petani (menggunakan kuesioner terstruktur), Pengurus Gapoktan, Kementan, Disperta, Penyuluh Pertanian, dan PMT menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Selain itu, *focus group discussion* (FGD) di tingkat desa.

Pengambilan sampel Gapoktan penerima PUAP dilakukan secara bertahap yaitu Gapoktan yang menerima Program PUAP antara 2009-2011, Gapoktan masih aktif, Gapoktan memiliki anggota petani pemilik, dan Gapoktan sudah membentuk LKM-A. Pengambilan sampel petani padi dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*), terdiri dari 50 petani di Desa Jati dan 50 petani di Desa Jamali.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu analisis *Double-Difference* dan analisis *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM). Menurut Ravallion (1999), metode *Double-Difference* adalah metode membandingkan antara kelompok perlakuan (*a treatment group*) dengan kelompok pembanding sebagai kontrol (*a comparison group*) sebelum dan setelah adanya intervensi program, dan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Double Difference: Dampak} = (T2-T1) - (C2-C1)$$

Keterangan:

- T2 : Produksi padi per hektar/pendapatan riil petani Desa Jati pada 2014 (setelah menerima program PUAP)
- T1 : Produksi padi per hektar/pendapatan riil petani Desa Jati pada 2009 (sebelum menerima program PUAP)
- C2 : Produksi padi per hektar/pendapatan riil petani Desa Jamali pada 2014 (setelah ada program PUAP tetapi tidak menerima Program PUAP)
- C1 : Produksi padi per hektar/pendapatan riil petani Desa Jamali pada 2009 (sebelum ada program PUAP)

Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan di perdesaan menggunakan analisis QSPM. Metode QSPM merupakan alat untuk memilih strategi atas dasar pendapat para ahli atau praktisi (*expert choice*) yang didasari faktor-faktor keberhasilan internal maupun eksternal, yang kemudian dilanjutkan dengan menetapkan pilihan yang terbaik atau *relative attractiveness* (David, 2011).

Secara teknis, tahapan dalam analisis QSPM meliputi: (i) penyusunan daftar kunci internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman); (ii) memberikan bobot untuk setiap faktor internal maupun eksternal; (iii) menentukan dan mengidentifikasi alternatif strategi yang dapat dilaksanakan; (iv) menentukan *Attractiveness Scores* (AS) sebagai nilai numerik yang menunjukkan *relative attractiveness* terhadap setiap alternatif strategi. AS ditentukan dengan menghitung tiap faktor kunci internal maupun eksternal; (v) menghitung total AS dengan mengalikan setiap bobot dengan AS masing-masing. Total AS menunjukkan *relative attractiveness* setiap alternatif strategi; dan (vi) menghitung rata-rata *Total Attractiveness Scores* (TAS). Nilai rata-rata TAS

yang paling besar menunjukkan strategi yang paling atraktif.

Beberapa intervensi program tidak selalu mencakup seluruh kelompok, ada kelompok yang menerima intervensi, ada pula kelompok yang tidak menerimanya. Sementara itu, evaluasi dampak suatu intervensi tidak harus menunggu intervensi tersebut selesai, namun dapat dilakukan pada saat intervensi program tersebut berlangsung. Evaluasi dampak dari kasus tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Ravallion dan Aghion & Morduch.

Ravallion (1999) mengembangkan suatu metode evaluasi dampak yang disebut Metode *Double Difference* dengan membandingkan antara kelompok perlakuan (*a treatment group*) dengan kelompok pembanding atau kontrol (*a comparison group*) sebelum dan setelah adanya intervensi. Ada empat tahap yang dilakukan dalam metode ini, yaitu (i) adanya '*baseline survey*' sebelum adanya intervensi program, baik terhadap kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol; (ii) '*follow up survey*' setelah adanya program; (iii) menghitung perbedaan antara sebelum dan setelah adanya program, baik terhadap kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol; dan (iv) menghitung perbedaan atau selisih antara kedua perbedaan tersebut. Hasil perhitungan ini merupakan perkiraan dari dampak program. Aghion dan Morduch (2005) melihat dampak program terhadap pendapatan dari berbagai faktor, dan dilakukan dengan memperbandingkan antara kelompok yang menerima program (*a treatment group*) dengan kelompok yang tidak menerima program (*a comparison group*). Kedua kelompok ini dibedakan dalam menganalisis dampak program terhadap pendapatan.

Empat langkah dalam memilih strategi dalam perumusan QSPM, yaitu pertama, menyusun daftar kunci eksternal, baik peluang maupun ancaman, serta daftar kunci internal, baik kekuatan maupun kelemahan. Kedua, dilakukan pembobotan untuk setiap faktor kritikal keberhasilan internal maupun eksternal. Ketiga, menentukan dan mengidentifikasi alternatif strategi yang dapat dilaksanakan. Keempat, menentukan AS sebagai nilai numerik yang menunjukkan *relative attractiveness* terhadap setiap alternatif strategi. Dalam proses menyusun strategis dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap masukan, tahap analisis, dan tahap keputusan.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, pemerintah memiliki strategi penanggulangan kemiskinan yang berkembang dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan berikutnya. Saat ini pemerintah menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan ke dalam empat klaster, yaitu Kluster I, Kluster II, Kluster III, dan Kluster IV. Kluster I mencakup kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang mencakup Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk keluarga miskin (Raskin), dan bantuan siswa miskin (BSM). Kluster II mencakup kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan jenis program yang disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Sedangkan Kluster III kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi kepada usaha mikro dan kecil diberikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kluster IV berupa Program Pro Rakyat yang menyediakan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin dengan harga murah koordinasi pelaksanaan kegiatan sektoral pada wilayah tertentu.

Salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di perdesaan adalah Program PUAP yang termasuk ke dalam Kluster II yang dimulai sejak 2008. Program ini memberikan bantuan langsung masyarakat dan setiap desa atau Gapoktan memperoleh BLM PUAP sebesar Rp100.000.000 dan digulirkan di Gapoktan tersebut. Bantuan BLM PUAP dialokasikan untuk kegiatan unit usaha sarana prasarana, unit usaha tani/produksi, unit usaha jasa pemasaran, unit usaha pengolahan, dan unit usaha simpan pinjam.

Dari pelaksanaan program-program pemerintah, secara nasional telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan pada kurun waktu 2008–2014, yaitu dari 15,42% pada 2008 menjadi 10,96% pada 2014 dan naik kembali menjadi 11,22% pada 2015. Namun, jika dilihat berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, tingkat kemiskinan di perdesaan selalu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan pada periode 2008–2015. Tingkat kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan dari 11,65% (2008) menjadi 8,16% (2014). Sementara itu, di perdesaan dari 18,93% (2008) turun menjadi 13,76% (2014). Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan di perkotaan naik kembali menjadi 8,29% dan di perdesaan menjadi 14,21%. Dari total rakyat miskin di Indonesia,

sekitar 66% berada di perdesaan dan sekitar 56% menggantungkan hidupnya dari pertanian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian kembali program-program penanggulangan kemiskinan khususnya bagi petani di perdesaan dan merumuskan kembali strategi penanggulangan kemiskinan sehingga didapatkan strategi terbaik berdasarkan kondisi internal dan eksternal yang nyata dihadapi oleh petani.

Untuk menguji seberapa jauh dampak Program PUAP terhadap peningkatan pendapatan riil petani maka dilakukan penelitian di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yaitu di Desa Jati yang menerima Program PUAP (*a treatment group*) dan Desa Jamali yang tidak menerima program PUAP (*a comparison group*) dengan menggunakan analisis *Double-Difference*. Kemudian dilakukan analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal strategis (analisis IFE-EFE) untuk mengetahui besarnya faktor kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang akan memengaruhi kesuksesan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis IFE-EFE tersebut dirumuskan strategi kunci penanggulangan kemiskinan di perdesaan dengan menggunakan analisis SWOT. Strategi kunci tersebut kemudian dianalisis dengan metode QSPM, yaitu dengan mengelaborasi strategi kunci tersebut dengan faktor-faktor strategis internal dan eksternal untuk mendapatkan strategi yang terbaik. Kerangka pemikiran penelitian ini selengkapnya di Gambar 1.

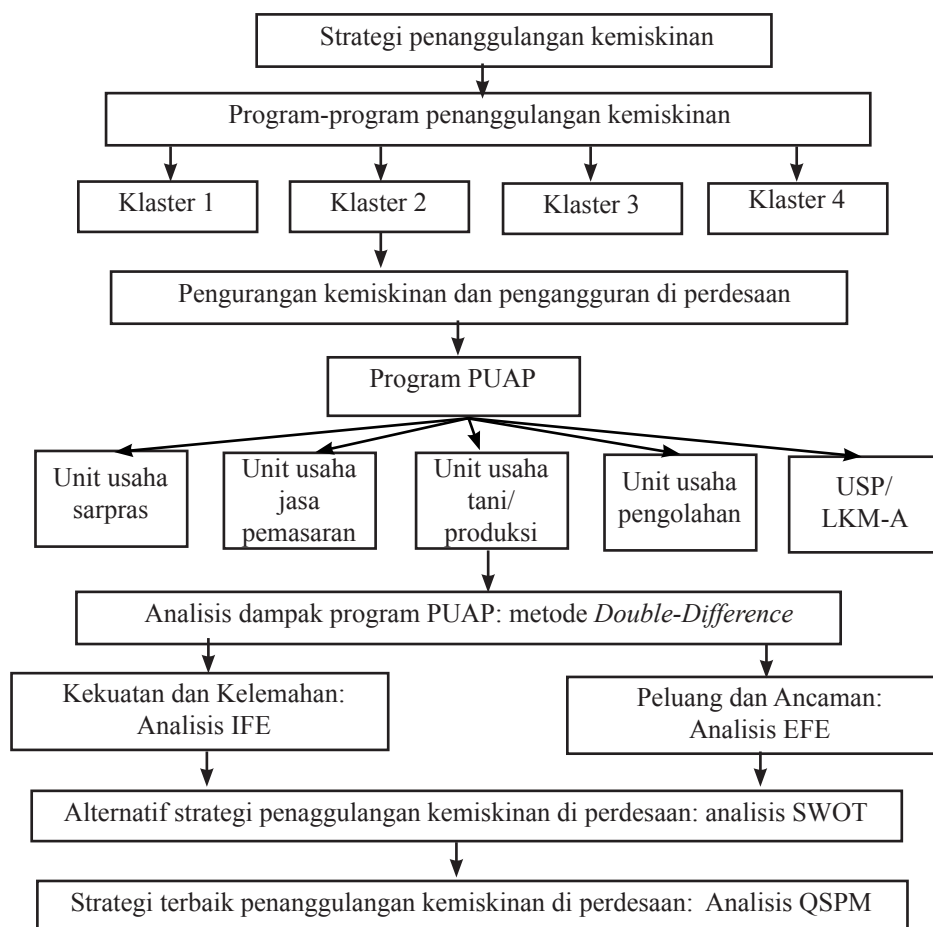
HASIL

Langkah pertama analisis *Double-Difference* adalah menghitung masing-masing perubahan produksi padi per hektar dan pendapatan riil petani di Desa Jati dan Desa Jamali pada 2009 (sebelum pelaksanaan Program PUAP) dan 2014 (setelah lima tahun pelaksanaan Program PUAP). Rata-rata peningkatan produksi padi di Desa Jati sebesar 770,22 kg per hektar dan di Desa Jamali sebesar 129,08 kg/ha selama 2009–2014 yang ditunjukkan pada Tabel 1. Dari segi pendapatan riil, di Desa Jati diperoleh rata-rata peningkatan pendapatan riil sebesar Rp1.084.616 dan di Desa Jamali sebesar Rp206.258 pada kurun waktu tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana dampak Program PUAP terhadap peningkatan pendapatan petani. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan nilai *Double-Difference*, yaitu dengan menghitung selisih rata-rata peningkatan produksi padi per hektar dan selisih rata-

rata peningkatan pendapatan riil petani di Desa Jati dan di Desa Jamali. Hasilnya nilai *Double-Difference* produksi padi (Tabel 1) adalah 641,14 kg/ha dan pendapatan riil adalah Rp878.358, keduanya signifikan pada $\alpha = 1\%$. Hal ini menunjukkan bahwa Program PUAP telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi padi dan pendapatan petani di Desa Jati daripada di Desa Jamali.

Dampak Program PUAP terhadap peningkatan produksi dan pendapatan riil tersebut disebabkan: (a) adanya perubahan penggunaan bibit yang bervariasi pada

sebelum Program PUAP menjadi bibit varietas unggul yang memiliki rendemen tinggi, yaitu mencapai 60 kg/kuintal gabah; (b) perubahan teknologi tanam dari sistem tegel menjadi sistem jarak legowo; (c) perubahan cara penjualan gabah kering pangut berubah yaitu penjualan ke tengkulak menjadi penjualan ke pengelola usaha penggilingan padi; (d) adanya pendampingan PMT dalam pembukuan dan simpan pinjam; (e) biaya pembelian pupuk lebih murah karena ada perubahan sistem pembayaran dari sistem yarnen (dibayar setelah panen) menjadi tunai; (f) harga jual gabah lebih tinggi.



Gambar 2. Kerangka pemikiran penelitian

Tabel 1. Rata-rata perubahan produksi/ha dan pendapatan riil di Desa Jati dan Desa Jamali: metode *Double-Difference*

Rata-rata perubahan proporsional, 2009–2014				
	Desa Jati (PUAP)	Desa Jamali (Non-PUAP)	DD/se	t-hitung
Produksi/ha (kg)	770,22	129,08	641,14** 238,5935	2,6871
Pendapatan Riil (Rp)	1.084.616	206.258	878.358** 267.643	3,2818

Analisis *Double-Difference* menunjukkan bahwa Program PUAP telah berhasil meningkatkan pendapatan petani. Namun, rata-rata pendapatan per kapita per bulan petani di Desa Jati (Rp261.481) ternyata masih berada di bawah garis kemiskinan Kabupaten Cianjur (Rp280.501) pada 2014. Selain itu, pelaksanaan Program PUAP tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Di tingkat Gapoktan, persoalan pelaksanaan PUAP berkaitan dengan masalah keuangan, baik yang bersifat komitmen untuk mengembalikan pinjaman ataupun pungutan-pungutan yang dialami oleh Gapoktan. Pandangan umum masyarakat, termasuk petani, bahwa bantuan pemerintah merupakan hibah yang tidak harus dikembalikan (atau digulirkan) masih menjadi masalah utama. Penyadaran dan pemahaman tentang hal ini perlu dilakukan pihak-pihak terkait kepada masyarakat, khususnya petani penerima bantuan Program PUAP. Selain itu, Gapoktan penerima Program PUAP juga mengalami pungutan dari berbagai pihak, antara lain dari kantor desa setempat, lembaga swadaya masyarakat, maupun perseorangan yang memperjuangkan perolehan dana bantuan Program PUAP tersebut. Oleh karena itu, kemudian dilakukan analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal strategis (analisis IFE-EFE) untuk

mengetahui kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang memengaruhi keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

Analisis matriks IFE dianalisis dari hasil identifikasi faktor-faktor strategis internal petani. Faktor-faktor ini dibobotkan dan dikelompokkan menjadi faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Tabel 2 menunjukkan bahwa total skor kelemahan (1,238) masih lebih besar daripada total skor kekuatan (1,143). Hal ini berarti bahwa responden menilai masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan Program PUAP serta kondisi petani dan kelembagaan petani masih lemah.

Analisis matriks EFE diperoleh dari hasil identifikasi faktor-faktor eksternal yang kemudian dibobotkan dan dikelompokkan menjadi faktor peluang dan faktor ancaman. Tabel 3 menunjukkan total skor terbesar dari faktor strategis eksternal adalah ancaman yaitu 1,105, sedangkan total skor peluang faktor strategis internal hanya sebesar 1,016. Hal ini berarti bahwa responden menilai masih banyak ancaman dari faktor eksternal terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

Tabel 2. Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE)

Faktor-faktor strategis internal	Rata-rata		Skor
	Bobot	Rating	
Kekuatan			
Beberapa kelompok tani sudah memiliki lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A) yang profesional sehingga petani lebih mudah mengakses bantuan modal	0,125	3	0,375
pendampingan khusus dari Penyelia Mitra Tani (PMT) kepada petani sehingga pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman petani semakin meningkat	0,131	3	0,393
Terdapat sistem pengadministrasian yang baku atau ditetapkan oleh Kementan dan pelaksanaan program diawasi langsung oleh Dinas Pertanian	0,125	3	0,375
Subtotal skor kekuatan faktor strategis internal			1,143
Kelemahan			
Kepemilikan lahan petani sempit (<0,3 ha) sehingga tidak efisien	0,094	2	0,188
Dana bantuan masih kurang, sehingga belum semua desa dan semua petani mendapatkan bantuan	0,100	2	0,200
Secara umum, petani belum memenuhi syarat perbankan (<i>non bankable</i>) sehingga bank belum memberikan kredit kepada petani	0,106	2	0,212
Akses petani terhadap program-program pemerintah di luar Kementan dan perbankan masih kurang	0,106	2	0,212
Pengurus poktan tidak memiliki keterampilan penggunaan IT/komputer, dan sulit mengakses internet	0,113	2	0,226
Kelembagaan di tingkat petani masih lemah	0,100	2	0,200
Subtotal skor kelemahan faktor strategis internal			1,238
Jumlah	1,000		2,381

Tabel 3. Matriks *Internal Factor Evaluation* (EFE)

Faktor-faktor strategis internal	Rata-rata		Skor
	Bobot	Rating	
Peluang			
Dengan Gapoktan dan LKM-A yang beberapa diantaranya sudah berbadan hukum, petani sudah memiliki organiasasi yang bisa menampung bantuan-bantuan dari sumber lain di luar Kementan seperti CSR dari perusahaan swasta	0,079	2,1	0,169
Adanya program-program dari kementerian (kemenkop, perindustrian, perdagangan, dll) seperti pelatihan-pelatihan manajemen, pameran, bazaar, kemudahan perijinan	0,079	2,1	0,169
Perbankan memiliki beberapa skema pinjaman modal lunak untuk usaha kecil dan mikro	0,084	2,3	0,192
Kelompok tani dapat melakukan kerjasama dengan kelompok tani di kabupaten, koperasi lain, sehingga pemasaran lebih luas	0,089	2,4	0,217
Pertambahan penduduk meningkatkan permintaan produk petani	0,084	2,3	0,192
Pasar bebas ASEAN (MEA)	0,053	1,4	0,075
Subtotal skor peluang faktor strategis eksternal			1,016
Ancaman			
Pasar bebas (termasuk pasar bebas ASEAN) menyebabkan produk petani harus bersaing dengan produk dari negara lain	0,074	2,0	0,147
Masing-masing kementerian menjalankan program bantuan sendiri sendiri (ego sektoral) dan tidak ada koordinasi sehingga petani kurang bisa mengakses program bantuan tersebut	0,089	2,4	0,217
Program-program bantuan yang sudah dilaksanakan lebih bersifat <i>top down planning</i> sehingga kelemahan dan permasalahan petani kurang diketahui	0,068	1,9	0,127
Keterampilan PMT kurang karena pelatihannya tidak dilakukan secara terus menerus, sehingga pendampingan ke gapoktan dan penyuluh juga kurang maksimal	0,074	2,0	0,147
Keterbatasan dana pendamping Pemda untuk memajukan kelompok tani	0,079	2,1	0,169
Prosedur penyaluran kredit masih rumit	0,079	2,1	0,127
Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi program belum dilaksanakan secara intensif	0,068	1,9	0,131
Subtotal skor ancaman faktor strategis eksternal			1,105
Jumlah	1,000		2,120

Hasil analisis matriks IE diperoleh koordinat dari nilai rata-rata tertimbang IFE sebesar 2,381 dan nilai rata-rata tertimbang EFE sebesar 2,120 (Gambar 3). Titik ini berada pada posisi kuadran V. Posisi pada kuadran V menunjukkan bahwa strategi yang dibutuhkan petani saat ini adalah strategi bertahan. Strategi bertahan menunjukkan bahwa petani saat ini membutuhkan strategi yang dapat meningkatkan kinerja internalnya. Dengan strategi ini petani diharapkan dapat membenahi diri dan memperbaiki kinerja internalnya sehingga dapat mengurangi kelemahan internal dan mengatasi atau menanggulangi ancaman eksternal.

Selanjutnya dengan menggunakan matriks kuadran SWOT diperoleh titik koordinat (-0,111; -0,008) berada pada posisi kuadran IV (Gambar 4). Posisi ini menunjukkan bahwa posisi petani yang lemah secara internal dan menghadapi tantangan yang besar dari faktor eksternal. Oleh karena itu, strategi kunci yang disarankan adalah strategi WT atau strategi bertahan.

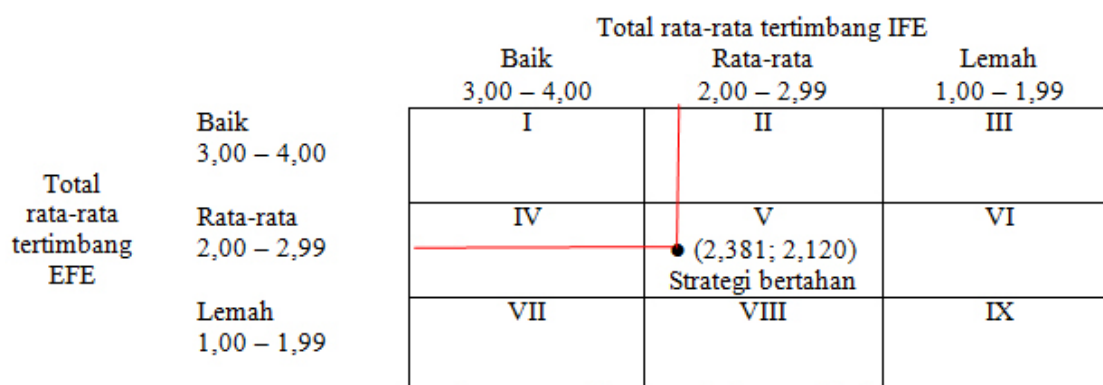
Strategi ini menggambarkan kondisi internal petani yang dilematis. Dengan demikian, petani perlu meningkatkan kinerja internal dan membenahi diri agar tidak semakin terpuruk.

Hasil wawancara mendalam dengan informan kunci diperoleh delapan strategi. Alternatif-alternatif strategi tersebut kemudian dianalisis dengan metode QSPM, yaitu dengan mengelaborasi delapan strategi tersebut dengan faktor-faktor strategis internal dan eksternal untuk mendapatkan strategi yang terbaik (Tabel 5).

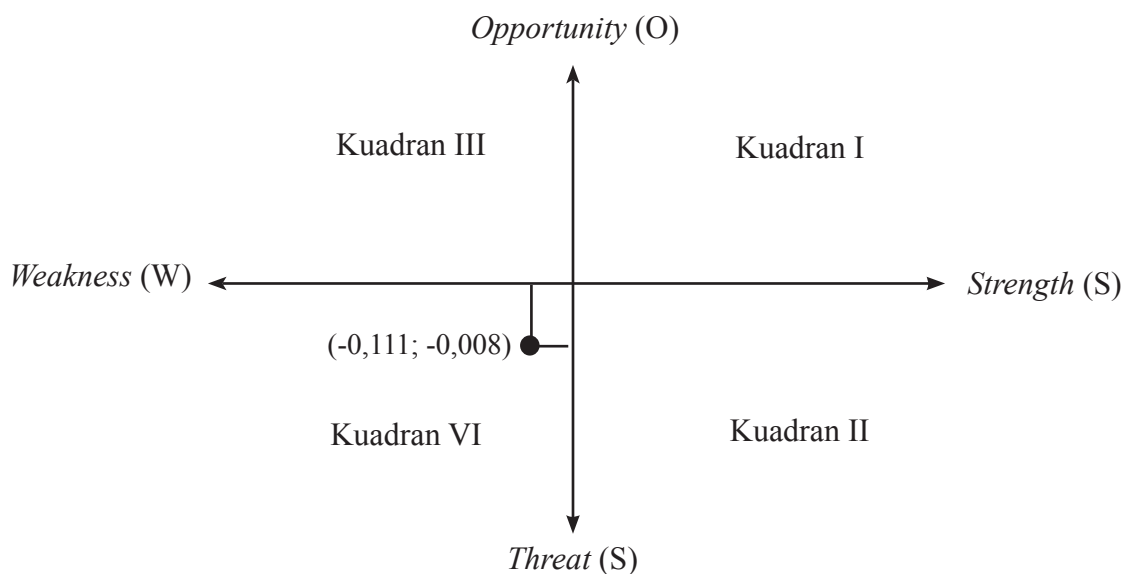
Hasil perhitungan TAS menunjukkan bahwa strategi penguatan sumberdaya manusia dan kelembagaan Gapoktan melalui program pendidikan khusus pengembangan manajemen agribisnis bagi petani adalah strategi yang terbaik karena memiliki nilai TAS tertinggi, yaitu 5,9726. Strategi ini dapat dilakukan dengan pendidikan atau pelatihan dalam manajemen

produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen pembukuan bagi petani. Hasil studi AGRI-MASS dalam Daryanto (1999) menunjukkan bahwa materi pelatihan manajemen agribisnis perlu memasukkan komponen pemasaran, akuntansi, keuangan, pembiayaan, manajemen, dan lain-lain. Salah satu kesimpulan dari penelitian Santoso *et al.* (2015) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemasaran. Saputra *et al.* (2009) menyebutkan bahwa peningkatan sumber daya manusia bagi peternak bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pembinaan seperti mengelola kelompok, koperasi, pengembangan permodalan, manajemen usaha, distribusi dan pemasaran. Pola semacam ini dapat diterapkan bagi petani padi.

Hal senada terjadi di India sebagaimana dikemukakan Acharya (2007) bahwa perencanaan makro sektor pertanian saat ini harus bergeser dari “hanya produksi” ke arah produksi dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan agribisnis, dan pergeseran ke arah inovasi sebagai kebutuhan khusus dari kewirausahaan. Demikian juga faktor pendidikan dan pengalaman sangat berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian, sebagaimana dikemukakan Pray and Nagarajan (2000) bahwa “.....education and experience have greatly contributed to increases in agriculture productivity in India, with agricultural production rising at annual rate of around 2,68% a year from 1961 to 2007”.



Gambar 3. Matriks Internal Eksternal (IE)



Gambar 4. Matriks kuadran SWOT

Tabel 5. Pemilihan prioritas strategi berdasarkan *total attractive score*

Alternatif strategi	Nilai TAS	Prioritas
Strategi S-O: Strategi ke-1. Mempromosikan program penyaluran pinjaman kepada petani untuk mendapatkan dukungan pendanaan misalnya melalui program <i>community social responsibility</i> (CSR), terutama kepada LKM-A yang telah berbadan hukum dan profesional	5,3998	6
Strategi S-T: Strategi ke-2. Meningkatkan peranan LKM-A yang berbadan hukum atau koperasi sebagai <i>marketing agent</i> untuk meningkatkan <i>market bargaining power</i> menghadapi pasar bebas	5,7707	5
Strategi ke-3. Mengoptimalkan peran Penyelia Mitra Tani (PMT) dalam hal pendampingan dan pembinaan petani dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada PMT secara intensif dan berkelanjutan	5,9495	2
Strategi W-O: Strategi ke-4. Adanya penjaminan kredit usaha tani dari pemerintah kepada perbankan yang menyalurkan kredit kepada petani	5,7943	4
Strategi ke-5. Mengkoordinasikan program-program Kementan dengan program-program lembaga terkait seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk pelatihan dan pendidikan petani	5,3145	7
Strategi W-T: Strategi ke-6. Meningkatkan efisiensi produksi petani seperti dengan land reform atau corporate farming	5,2066	8
Strategi ke-7. Penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan Gapoktan melalui program pendidikan khusus pengembangan manajemen agribisnis bagi petani	5,9726	1
Strategi ke-8. Penambahan anggaran untuk program bantuan modal kepada petani terutama di desa-desa miskin yang belum memperoleh bantuan modal	5,8674	3

Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi petani telah diungkapkan oleh berbagai penelitian di berbagai negara. Bairwa *et al.* (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa manajemen pendidikan agribisnis sangat diperlukan untuk mengembangkan tenaga kerja terlatih, dapat menciptakan peluang usaha atau bisnis, mengurangi kemiskinan melalui pengembangan pertanian di India. Hans (2008) memiliki kesimpulan yang sejalan mengenai pentingnya pendidikan manajemen secara nyata, bukan hanya memberikan data dan informasi belaka sehingga diperlukan reformasi di bidang pendidikan pertanian, termasuk pendidikan manajemen, bagi petani dan buruh di perdesaan yang menyangkut pendidikan manajerial dan pembiayaan, peningkatan pengetahuan dan keahlian.

Salah satu kesimpulan dari penelitian Sharma (2008) adanya kebutuhan membantu petani untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, memberikan akses kepada petani untuk memperoleh input yang berkualitas dan tepat waktu, pemberian penyuluhan, memberikan peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pendapatan *off-farm* untuk meningkatkan status keuangan, dan keanggotaan petani dalam organisasi petani memiliki nilai positif. Innocent dan Adefila (2014) menyimpulkan pentingnya pelatihan (*training*)

dan pelatihan kembali (*re-training*) bagi para anggota untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan bagi organisasi agar berfungsi dengan baik. Hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan seminar, *workshop*, atau kegiatan lain.

Implikasi Manajerial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi para pemangku kepentingan yang terkait, antara lain:

Bagi pemerintah pusat dan daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai (1) masukan untuk mengukur dampak program ketika program sedang berjalan sehingga bisa dilakukan perbaikan sebelum program tersebut berakhir; (2) mengevaluasi suatu program apakah bisa dilanjutkan atau dihentikan; (3) mengukur efektivitas suatu program dengan membandingkan *output* program terhadap indikator yang berlaku; (4) menyusun strategi program-program penanggulangan kemiskinan, terutama di perdesaan, berupa kebijakan atau program yang melibatkan atau mempertimbangkan pendapat para pelaksana program di tingkat daerah (*bottom up*) sehingga kebijakan atau program sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal petani atau kelompok tani.

Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 1) bahan pertimbangan penelitian lanjutan atau penelitian yang sama di wilayah lain; 2) sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui dampak program lain dan menyusun strategi yang terbaik; 3) memperkaya pengetahuan atau penelitian yang berkaitan dengan strategi penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Program PUAP memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produksi padi dan pendapatan riil petani PUAP dibandingkan dengan petani non-PUAP. Namun demikian, peningkatan pendapatan petani di desa penerima program PUAP belum dapat melampaui garis kemiskinan Kabupaten Cianjur pada saat yang sama atau dengan kata lain pendapatan perkapita petani masih tetap berada di bawah garis kemiskinan. Lebih jauh lagi analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan penanggulangan kemiskinan di perdesaan (analisis IFE-EFE) menunjukkan bahwa faktor *weakness* lebih dominan daripada faktor *strength* dan faktor *threat* lebih dominan daripada faktor *opportunity*. Kelemahan-kelemahan yang masih mendominasi faktor strategis internal adalah lahan yang sempit, alokasi dana bantuan langsung masyarakat masih kecil, petani belum *bankable*, kurangnya akses petani terhadap program di luar Kementan, rendahnya pengetahuan dan keterampilan sumberdaya pengurus Poktan, dan lemahnya kelembagaan Poktan. Ancaman yang mendominasi faktor strategis eksternal adalah adanya pasar bebas, masih kentalnya ego-sektoral, program bersifat *top down planning*, kurangnya pelatihan bagi PMT, keterbatasan dana pendamping, rumitnya penyaluran kredit, dan kurangnya pembinaan serta monitoring-evaluasi program.

Strategi yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi kemiskinan di perdesaan dengan lebih cepat. Studi ini memberikan alternatif strategi melalui Dengan demikian alternatif-alternatif strategi yang sebaiknya dirumuskan untuk penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Strategi tersebut adalah strategi WT yaitu berupa strategi untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal dan meminimalkan atau menanggulangi ancaman eksternal. Hasil analisis

QSPM menunjukkan bahwa strategi penguatan sumberdaya manusia dan kelembagaan Gapoktan melalui program pendidikan khusus pengembangan manajemen agribisnis adalah strategi yang terbaik. Penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen pembukuan yang bersifat sederhana bagi petani. Pendidikan dan pelatihan dilakukan secara meluas dan mendalam, serta berkesinambungan.

Saran

Dalam era agribisnis, aktor utama pembangunan agribisnis dan aktor pendukungnya perlu mendapatkan pembinaan kemampuan aspek bisnis, manajerial, dan organisasi bisnis petani serta peningkatan wawasan agribisnis. Dalam hal ini diperlukan juga perubahan fungsi atau penambahan unit dalam Balai Penyuluhan Pertanian yang selama ini sebagai lembaga penyuluh agro-teknis menjadi Klinik Konsultasi Agribisnis. Unit ini diharapkan memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan tentang usaha agribisnis, baik teknis produksi maupun manajemen usaha taninya. Pendidikan dan pelatihan perlu kerjasama dari berbagai lembaga sehingga lembaga-lembaga terkait bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Diharapkan dengan strategi peningkatan sumber daya manusia tersebut petani dapat menjadi *agripreneur*.

Dalam jangka panjang, pengembangan lahan usaha pertanian harus lebih difokuskan pada produk-produk olahan hasil pertanian yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, seperti pengembangan agroindustri yang berorientasi ekspor. Ego-sektoral yang selama beberapa dekade terakhir ini sulit dihilangkan, kini saatnya berkomitmen dan bersinergi untuk membantu petani, kelompok tani, dan masyarakat miskin perdesaan agar dapat keluar dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya SS. 2007. Agribusiness in India: some facts and emerging issues. *Agricultural Economics Research Review* 20 (Conf Issue): 409-424.
- Aghion D, Beatriz A, Morduch J. 2005. *The Economics of Microfinance*. The MIT Press.
- Anggriani, TW. 2012. Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program Magister

- Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.
- Anriquez G, Kostas S. 2007. Rural development and poverty reduction: is agriculture still the key? *Journal of Agriculture and Development Economics* 4 (1): 5–46.
- Ariyati F. 2011. Pemberdayaan masyarakat berbasis program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP). *FOCUS* 1 (2).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2008 [Poverty Data and Information 2008] Book 1: Province*. Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2008 [Poverty Data and Information 2008] Book 2: Kabupaten/Kota*. Jakarta: BPS.
- Bairwa SL et al. 2014. Agribusiness Management Education: A Review on Employment Opportunities. *International Journal of Scientific and Publication* 4(2): 1–4.
- Burhansyah R. 2010. *Pemberdayaan Gapoktan PUAP Kalimantan Barat Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Petani di Pedesaan*. Ciamis: Universitas Galuh.
- Cromwell E, Cecilia L, Andrew S, and Steve W. 2005. Poverty Reduction Strategies and the Rural Productive Sectors: Insigh from Malawi, Nicaragua and Vietnam. *ODI Working Paper* 258: 1–40.
- Daryanto A, Heny KSD. 1999. Model kepemimpinan dan profil pemimpin agribisnis. *AGRIMEDIA* 5(1): 6–17.
- David FR. 2011. *Strategic Management: Concepts and Cases*. Prentice Hall.
- De Rosari BB, Sinaga BM, Kusnadi N, dan Sawit MH. 2014. The impact of credit and capital supports on economic behavior of farm households: a household economic approach. *International Journal of Food and Agriculture Economics* 2(3):81– 90.
- Francis NF, David AK. 2012. The challenges of agriculture and rural development in Africa: the case of Nigeria. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development* 1 (3): 45-61.
- Hans VB. 2008. Agri-business and rural management in india – issues and challenges. *SSRN Electornic Journal* September(2008): 1–22.
- Innocent Y, Adefila JO. 2014. Farmers’ cooperatives and agricultural development in kwali area council federal capital territory Abuja, Nigeria. *International Journal of Humanities and Social Science* 4(7.1): 161–169.
- Kamira D, Melinda N, Firwan T. 2011. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kota Padang*. Padang: Program Pasca Sarjana, Universitas Andalas.
- Kirchweger, S, Kantelhardt, J, dan Leisch, F. 2015. Impact of the government-support investment on the economic farm performance in Austria. *Agric.Econ-Czech* 61(8): 343–355.
- Kohls, Richard L, Joseph NU. 2002. *Marketing of Agricultural Products. Ninth Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Lastinawati E. 2011. Partisipasi petani dalam pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di OKU. *AgronibiS*, 3(5):47–57.
- Ravallion M. 1999. *Assessing the Poverty Impact of an Assigned Program (Chapter 5 Tool Kit)*. Washington: World Bank.
- Prabandari AC, Sudarma M, Wijayanti PU. 2013. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi produksi padi sawah pada daerah tengah dan hilir aliran sungai ayung (studi kasus subak mambal, kabupaten Badung dan subak pagutan, kota denpasar). *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*. 2(3): 89–98.
- Pray CE, Nagarajan L. 2012. Innovation and research by private agribusiness in india. International Food Policy Research Institute. <https://www.ifpri.org/publication/innovation-and-research-private-agribusiness-india>. [12 Juni 2016].
- Santoso I, Yuwandini D, Mustanirah SA. 2015. Pengaruh kredit dan sumber daya manusia terhadap kinerja umkm agroindustri dengan pemasaran sebagai variabel antara. *Jurnal Manajemen & Agribisnis* 12 (3): 174–182.
- Saptana, Wahyuni, S, Pasaribu, SM. 2013. Strategi percepatan transformasi kelembagaan gapoktan dan lembaga keuangan mikro agribisnis dalam memperkuat ekonomi di perdesaan. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis* 10(1): 60–70.
- Saputra H, Daryanto A, Hendrawan DS. 2009. Strategi pengembangan ternak sapi potong berwawasan agribisnis di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis* 6(2): 152–162.

- Sekretariat PUAP, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. 2012. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2012.
- Setiaaji H. 2013. Dampak program pengembangan usaha agribisnis perdesaan terhadap pendapatan anggota gabungan kelompok tani. [Tesis]. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sharma, VP. 2008. Inida's agrarian crisis and corporate-led contract farming: socio-economic implications for smallholder producers. *International Food and Agribusiness Management Review* 11(4): 25–48.
- Hasyim H, Silvira, Fauzia L. 2013. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi produksi padi sawah (studi kasus: desa medang, kecamatan medang deras, kabupaten batu bara). *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness* 2(4): 1–12.
- Sisilia, Aritonang M, Kurniati D. 2012. Analisis komparatif pendapatan petani padi penerima bantuan modal PUAP dan petani non penerima bantuan modal PUAP di Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. *Jurnal Sosial Ekonomi* 1(3): 14–22.
- Suryadi, D, Sutyastie SR, dan Muljarijadi, B. Tanpa tahun. Pengaruh Pemberian Bantuan Usahatani melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terhadap Peningkatan Pendapatan Usahatani (Sebuah Studi Kasus di Kabupaten Purwakarta).
- Teddlie C, Yu F. 2007. Mixed method sampling: a typology with examples. *Journal of Mixed Method Research* 1(1): 77–100.
- [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program, Klaster I, Klaster II, Klaster III. <http://www.tnp2k.go.id/id/program/>. [12 November 2014]
- [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2012. *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan: Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah*. Jakarta: TNP2K.
- Wibowo, H dan Hayati, N (2013). Strategi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dalam Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Agribisnis (LKMA). Proceeding Seminar Nasional dan Call for paper Sancall 2013. <http://ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3833/10.%20Hendro%20Wibowo%20%26%20Nur%20Hayati.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. [12 Juni 2016]
- World Bank. 2006. *Making the New Indonesia Work for the Poor*. Jakarta.